

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini muncul perdebatan mengenai dampak negatif lingkungan dan sosial. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan sumber daya yang tidak bijaksana dan proporsional oleh perusahaan bisnis. Perusahaan telah dituduh bertanggung jawab atas banyaknya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Dampak paling negatif yang mungkin terjadi ditemukan di setiap kegiatan operasional bisnis perusahaan adalah polusi udara, limbah produksi, ketidaksetaraan, diskriminasi dan lain-lain. Dampak yang mungkin muncul tersebut dalam setiap kegiatan operasional perusahaan ini tentunya akan membawa hasil untuk lingkungan sekitar perusahaan dalam bisnis.

Contoh dampak negatif yang dirasakan di Indonesia sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan yaitu pencemaran udara yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah PT Rayon Utama Makmur (RUM) melalui saluran pembuangan di area pemukiman warga Sukoharjo Jawa Tengah yang mengakibatkan warga harus mengungsi dan meninggalkan wilayah tersebut. Dampak negatif tersebut dikarenakan perusahaan melakukan kegiatan uji coba produksi pengolahan benang tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan (sindonews.com).

Dari masalah yang ditimbulkan ini perusahaan dituntut untuk mengubah paradigma, dimana yang selama ini mengacu pada *profit oriented only*, kemudian beralih pada konsep *Tripple-P Bottom Line* (Soelistyoningrum, 2011). *Profit oriented only* hanya menekankan kinerja keuangan saja, tetapi saat ini perusahaan juga harus memberikan informasi non keuangan yaitu mengenai aktivitas sosial perusahaan. Tuntutan masyarakat terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan, meningkatkan akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang semakin baik (*good corporate governance*) yaitu dengan mengungkapkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial didalam laporan tahunan ataupun secara terpisah kepada para investor dan *stakeholder*.

Beralihnya ketiga aspek tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (*profit-people-planet*), maka perusahaan akan menggunakan dalam mencapai *sustainable development*. Fenomena-fenomena tersebut kemudian menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang ada sekarang untuk tetap terjaga, karena jumlah yang tidak terbatas akan mengakibatkan berbagai dampak yang buruk bagi lingkungan, sehingga perusahaan dituntut untuk menggunakan dan melakukan aktivitas bisnisnya dengan lebih efektif serta efisien dalam memenuhi kebutuhan operasinya (Widianto, 2011).

Seiring dengan berjalannya waktu timbulah suatu kesadaran untuk lebih menjaga lingkungan di Indonesia, isu mengenai tanggung jawab sosial yang semakin pesat, perusahaan mulai melakukan pelaporan aktivitas sosialnya walaupun masih bersifat sukarela (*voluntary*) hingga akhir 2016 tercatat 120 perusahaan yang telah menerbitkan laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) di Indonesia (mediaindonesia.com).

Sustainability reporting adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Dalam pengungkapan *sustainability report* pedoman yang digunakan sesuai dengan yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI G4). GRI mengharuskan perusahaan untuk melaporkan visi dan strategi, profil, tata kelola, pendekatan manajemen sebagaimana *sustainability key performance indicator* (KPIs) Ini berfungsi sebagai salah satu set paling menonjol dari pedoman yang menyediakan cara yang layak melaporkan *triple botton line*. *Sustainability Reporting* merupakan laporan yang berkelanjutan yang berdiri sendiri atau terpisah dan lebih terperinci yang tidak terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan (Soelistyoningrum, 2011).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tertuang didalam Bab V Pasal 74. Pada Pasal 74 ayat (1) menetapkan bahwa perseroan memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik dari perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Peraturan diatas menjelaskan apabila perseroan tidak melakukan kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berarti tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu, undang-undang tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosialnya yang kemudian di ungkapkan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*).

Sustainability reporting merupakan bukti bahwa telah adanya komitmen dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang dapat dinilai hasilnya oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu *sustainability reporting* menjadi bukti salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan warga negara ataupun *stakeholder*-nya sebagai salah satu upaya penerapan pendidikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penyusunan *sustainability reporting* pada saat sekarang ini menempati posisi yang sama pentingnya juga dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan (Nasir dkk, 2013).

Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007). *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder*. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009).

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada

perusahaan, menandai, dan membedakannya dari perusahaan lain. Profitabilitas perusahaan merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial. Likuiditas sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar perusahaan semakin memiliki kecenderungan untuk mengungkap informasi lebih banyak, sehingga semakin mungkin untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability reporting* (Suryaningsih, 2017).

Penelitian ini mereplika penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Prastiwi tahun 2010. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel yang digunakan, peneliti ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016. karena perusahaan manufaktur memiliki banyak resiko yang akan terjadi seperti resiko pencemaran lingkungan melalui kegiatan operasional perusahaan. Dan penelitian ini menambahkan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, terarah dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *corporate governance* dan karakteristik perusahaan.
2. Variabel dependen yaitu *sustainability reporting*.
3. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.

4. Perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Luasnya konstruk yang dibangun dan didasarkan latar belakang seperti dijelaskan di atas, penelitian ini meneliti model dalam pengaruh *corporate governance*, dan karakteristik perusahaan terhadap *sustainability reporting*, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris terhadap *sustainability reporting*?
2. Bagaimana pengaruh signifikan rapat dewan komisaris terhadap *sustainability reporting*?
3. Bagaimana pengaruh signifikan komite audit terhadap *sustainability reporting*?
4. Bagaimana pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *sustainability reporting*?
5. Bagaimana pengaruh signifikan proporsi komisaris independen terhadap *sustainability reporting*?
6. Bagaimana pengaruh signifikan profitabilitas terhadap *sustainability reporting*?
7. Bagaimana pengaruh signifikan likuiditas terhadap *sustainability reporting*?
8. Bagaimana pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap *sustainability reporting*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap *sustainability reporting*
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rapat dewan komisaris terhadap *sustainability reporting*
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap *sustainability reporting*

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *sustainability reporting*
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *sustainability reporting*
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *sustainability reporting*
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh likuiditas terhadap *sustainability reporting*
8. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainability reporting*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah pengetahuan bagi pembaca tentang praktik *sustainability reporting* di perusahaan dan memberikan literatur terbuka akan Pengaruh ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *sustainability reporting* di perusahaan.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi investor, *sustainability reporting* digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki potensi *sustainability* yang baik.
- b) Bagi perusahaan/manajemen, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai kebijakan *sustainability reporting* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut rincian dari gambaran penulisan penelitian yang akan dilakukan :

BAB I Pendahuluan

Bab tersebut berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab tersebut menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab tersebut menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional, jenis data dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab tersebut mengandung penjelasan deskripsi analisi data serta pembahasannya dari obyek penelitian.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

